KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12510

SURAT TUGAS

Nomor: 000.2.2.4/4955/BPD

Dasar : Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor SP DIPA-010.05.1.027753/2026, tanggal 1 Desember 2025 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026, maka Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa,

MEMERINTAHKAN:

Kepada :

1. Nama : Fikri Wardhana Ohorella, S.STP, M.A.P.
   Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
   NIP : 19920327 201206 1 001
   Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Subdirektorat Fasilitasi LPD dan BPD
2. Nama : Sumarwanto, S.I.P.
   Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)
   NIP : 19890512 202012 1 011
   Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Subdirektorat Fasilitasi LPD dan BPD
3. Nama : Deby Rositaini, S.E.
   Pangkat/Golongan : PPPK (IX)
   NIP : 198705162025212014
   Jabatan : Penata Layanan Operasional pada Subdirektorat Fasilitasi LPD dan BPD
4. Nama : Endang Sri Rejeki, SP., MM
   Jabatan : Tenaga Ahli pada Subdirektorat Fasilitasi LPD dan BPD
5. Nama : Androykel Salettia, S.H., M.H.
   Jabatan : Asisten Tenaga Ahli pada Subdirektorat Fasilitasi LPD dan BPD

Untuk :

1. Melaksanakan tugas Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi dan Advokasi Penerapan Reformasi Birokrasi Di Desa di Provinsi D.I Yogyakarta pada tanggal 9 s.d. 11 September 2026; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Fasilitasi Kerja Sama, Lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 1 September 2026

a.n. Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Murtono,S.STP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19780503.199702.1.002

Tembusan:
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara